

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Chandra, Tofik Yanuar. *Deponeering Dalam Hukum Pidana Indonesia*. PT Sangir Multi Usaha, 2022.
- Darmono. *Penyampingan Perkara Pidana Seponering Dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Solusi Publishing, 2013.
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode penelitian hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media, 2018.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- . *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Harahap, M Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Husin, Kadri, dan Budi Rizki Husin. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004.
- Kaligis, O. C. *Deponeering, Teori dan Praktik*. Bandung: PT Alumni, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017.
- Mia, Amiati. *Memaknai Kepentingan Umum Dalam Oportunitas Jaksa Agung (Tinjauan Perspektif Teoretis)*. Jakarta: Miswar, 2014.
- Prakoso, Djoko. *Eksistensi Jaksa di Tengah-tengah Masyarakat*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Rosady, Ruslan. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- Simanjuntak, Osman. *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum*. Jakarta: PT Gramedia Widisarana, 1995.
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan*

R&D. Bandung: Alfabeta, 2017.

Suteki, dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2018.

Jurnal

Dando, Shigemitsu. "System of Discretionary Prosecution in Japan." *The American Journal of Comparative Law* 18, no. 3 (1970): 518–31.

Daniel Ch. M. Tampoli. "Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Oleh Jaksa Berdasarkan Hukum Acara Pidana." *Lex Privatum*, Vol. IV/No, no. 2 (2016): 124–32.

Hairi, Prianter Jaya. "Pengesampingan Perkara Pidana Abraham Samad dan Bambang Widjojanto." *Info Singkat Hukum Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI VIII*, no. 4 (2016): 2. http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-VIII-4-II-P3DI-Februari-2016-71.pdf.

Hasrina, Sri, Muhammad Said Karim, dan Hijrah Adiyanti Mirzana. "Konsep Kepentingan Umum Dalam Asas Oportunitas Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Indonesia Journal of Criminal Law* 3, no. 1 (2021): 33–39.

Hidayat, Ahmad Arif, Nyoman Serikat Pj, dan Sukinta. "Kepentingan Umum Sebagai Dasar Pertimbangan Penerapan Asas Oportunitas oleh Jaksa Agung dalam Proses Peradilan Pidana." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 1–16.

Iqbal, Muhammad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9, no. 1 (2018).

Mustriadhi, Aris. "Ratio Legis Tidak Adanya Pengaturan Upaya Hukum dari Deponering yang Dikeluarkan oleh Jaksa Agung." *Yurispruden* 3, no. 1 (2020): 78–92.

Reksodiputro, Mardjono. "Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Lex Specialis* 1, no. 11 (2010): 1–10. http://jih.unbari.ac.id/index.php/LEX_SPECIALIST/article/view/98.

Rosita, Dian. "Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara Di Bidang Penuntutan Dalam Struktur Kenegaraan Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* 3, no. 1 (2018): 27–47.

Santosa, I Kadek Darma, Ni Putu Rai Yuliartini, dan Dewa Gede Sudika Mangku. "Pengaturan Asas Oportunitas Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia."

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha 9, no. 1 (2021): 70–80.
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/31429>.

Sari Dewi Polontalo, Ratna. “Independensi Jaksa Sebagai Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.” *Lex Crimen* VII, no. 6 (2018): 35–41.

Setiawan, Dwi Nugroho. “Implementasi Asas Oportunitas di Indonesia.” *Jurnal Jendela Hukum* 11, no. 1 (2024): 29–43.
<https://ejournalwiraraja.com/index.php/FH/article/view/1956>.

Sihombing, Dedy Chandra, Alvi Syahrin, Madiasa Ablisar, dan Mahmud Mulyadi. “Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif.” *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2023): 63–75.
<https://doi.org/10.56128/jkih.v3i2.42>.

Sudirdja, Rudi Pradisetia. “Penguatan Kewenangan Penuntut Umum Melalui Pengesampingan Perkara Pidana Dengan Alasan Tertentu.” *Litigasi* 20, no. 2 (2019): 291–313. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v20i2.2032>.

Tambuwun, Bryan Saputra. “Upaya Hukum Terhadap Deponering Dalam Hukum Progresif.” *Lex Crimen* 4, no. 2 (2015): 191–98.
http://dx.doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2016.03.027%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.mri.2013.04.010%0Ahttp://dx.doi.org/10.1162/jocn_a_00409%5Cnhttp://www.mitpressjournals.org/doi/abs/10.1162/jocn_a_00409%0Ahttp://www.med-info.nl/Afwijking_OOGHEELKUNDE.

Yuherawan, Deni, dan Muhammad Huzaini. “Pertentangan Antara Asas Oportunitas dengan Asas Equality Before The Law (Pasal 35 Huruf C UU Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia).” *Justitia Jurnal Hukum* 6, no. 2 (2021): 165–75.

Laporan

Hamzah, Andi. “Analisis Evaluasi Pelaksanaan Asas Oportunitas dalam KUHAP.” *BPHN*. Jakarta, 2006.

Pusat Pengkajian dan Penelitian Kejaksaan Agung. “Pengkajian Posisi Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana.” Ujung Pandang, 1981.

Makalah

Hidayat, Arief. “Negara Hukum Berwatak Pancasila.” In *Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan (ADPK) & Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia (AP3KnI)*, 1–13, n.d.

Rapat

Nasution, Karim. “Dengar Pendapat Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Masalah Hukum Acara Pidana.” 2004.

Skripsi

Baskoro, Adi. “Analisis Eksistensi Kejaksaan Sebagai Lembaga Pemerintah dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.” Universitas Sebelas Maret, 2009.

Boemiya, Helmy, Aan Eko Widiarto, dan Riana Susmayanti. “Implikasi Yuridis Kedudukan Jaksa Agung Sebagai Pejabat Negara Setingkat Menteri terhadap Masa Jabatan Jaksa Agung,” 2012.
<http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111406/>.

Surat Kabar

Rahardian, Lalu. “Jaksa Agung Minta Pertimbangan Deponering Kasus Samad-Bambang.” *CNN Indonesia*, 12 Februari 2016.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160212124729-12-110547/jaksa-agung-minta-pertimbangan-deponering-kasus-samad-bambang>.

Sarwanto, Abi. “DPR Tolak Deponering Abraham Samad-Bambang Widjojanto.” *CNN Indonesia*, 11 Februari 2016.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160211191059-32-110438/dpr-tolak-deponering-abraham-samad-bambang-widjojanto>.